

PENGUATAN HUMAN SECURITY MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA BRUJUL KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh :

Setyasih Harini dan Halifa Haqqi

Universitas Slamet Riyadi

Jl. Sumpah Pemuda No. 18 Kadipiro Surakarta

setyasih.rini@unisri.ac.id

ABSTRACT

Modern society is the result of joint relations between men and women. Nowadays, women's subordination obstacle to women's development and advancement. Women's subordination as a kind of patriarchy system also deeper poverty. No progress of society without women activities. Empowering of women become a way to increase human security. The purpose is how to empower village women of Brujul, sub-district Jaten, Karanganyar regency. Increasing empowerment of village women is very important. It can develop and progress society in that village. There are three indicators of women empowerment: security, decision making and mobility. Method of this community service is meeting and discussion with the women of Brujul village. The result of this discussion that security of the women from Brujul still influenced by patriarchy system and lower education. Furthermore, the older married women had less power to increase their security. The younger married women with higher education have more power in decision making process of household and health. Higher education background can influence of women mobility. The women mobility also dependent upon how their family view women's right. The result of this community service show that increasing knowledge about human right, human security and empowerment is very important for the women of Brujul village.

Key words: women, empowerment, human security

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Salah satu faktor kemiskinan yang ada di negara ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu pendorong kemiskinan juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang masih menganggap laki-laki sebagai penopang kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, masyarakat masih rentan dengan konsep patriarki yang tertanam mendalam sebagai warisan dari para pendahulunya. Bhasin

(2006:3) seperti dikutip oleh Abeda Sultana menyatakan bahwa istilah patriarki merujuk pada aturan yang dibuat oleh ayah atau patriarch. Istilah ini semula digunakan untuk mendeskripsikan tipe spesifik yang menempel pada diri laki-laki (ayah) dengan perannya yang cukup mendominasi dalam keluarga. Peran ayah dalam keluarga sesuai dengan konsep patriarki termasuk melindungi dan membuat aturan-aturan yang mengikat perempuan, laki-laki lain yang lebih muda, anak-anak, buruh dan pelayan rumah tangga. Sekarang istilah ini secara umum mengacu pada dominasi laki-laki, hubungan

kekuasaannya untuk mengikat dan mendominasi kaum perempuan. Dengan kata lain, menempatkan perempuan pada posisi setingkat lebih bawah atau sub-ordinat. Dari sinilah kemudian memunculkan permasalahan yang harus dipecahkan melalui pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan. Permasalahan tersebut adalah Bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan perempuan pedesaan di Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.

Permasalahan tersebut dapat ditelaah lebih mendalam melalui pendekatan tentang patriarki sebagai tonggak terjadinya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Patriarki secara khusus mengacu pada dominasi terhadap perempuan dalam ranah publik dan prifat. Oleh kaum Feminis, kedudukan laki-laki yang seperti itu menunjukkan ketidakseimbangan peran dan relasi yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja, konsep patriarki tersebut dapat digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap ketidakamanan perempuan terhadap laki-laki. Jika dilihat lebih jauh ke dalam masyarakat pedesaan saat ini, khususnya perempuan pedesaan rasanya masih sarat dengan ketidakamanan insani terkait hak asasinya.

Ketidakmanan insani atau yang lebih populer dengan kurangnya akses bagi perempuan untuk berkembang menjadikannya masih terpuruk dan terbelit dengan kuatnya pengaruh budaya sebagai warisan leluhur. Masyarakat Indonesia masih mempercayai

bahwa dalam membina kehidupan rumah tangga, laki-lakilah yang memiliki wewenang dan hak untuk mengatur dan menentukan arah keluarga. Laki-laki menjadi sosok yang memiliki pengaruh kuat terhadap semua orang yang berada dalam keluarga. Masyarakat patriarki yang berlaku di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Abubakar Eby Hara menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan dan posisi yang kuat meskipun sering tidak atau kurang mempedulikan pada peran dan posisi perempuan yang ada dalam keluarga. Pada tingkat nasional, masih banyak terdapat aturan-aturan yang kurang memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat lebih banyak dalam bidang sosial dan politik (2007:2). Hal ini menunjukkan pula masih kuatnya pengaruh budaya patriarki yang memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Kuatnya pengaruh budaya oleh Batara (2006: 12) berdampak pada kurangnya kemampuan perempuan dalam menentukan serta memutuskan segala sesuatu yang terkait dengan jati diri dan perannya. Budaya juga memengaruhi wewenang perempuan dalam mengatur kehidupan rumah tangga yang mengerucut pada ketidakberdayaannya dalam hal privasi seperti kesehatan reproduksi.

Jika dilihat lebih lanjut, keamanan yang kemudian mengerucut menjadi keamanan insani (*human security*) merupakan bagian yang semula menjadi ranah dari politik. Dalam konsepsi klasik, keamanan lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang

muncul dari luar. Konflik antar negara khususnya dalam upaya memperluas imperium daerah jajahan membawa definisi *security* hanya ditujukan kepada bagaimana negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Hara (2007: 4) menambahkan bahwa pendekatan human security dirancang untuk memperbaiki kondisi perempuan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, migrasi sebagai permasalahan pada umumnya.

Dalam pengembangan human security, penekanan yang biasanya muncul adalah kemiskinan yang menjadi permasalahan utama pada perempuan pedesaan. Partisipasi perempuan yang rendah dalam bidang usaha mencari nafkah bagi perempuan pedesaan setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, ikatan yang kuat terhadap budaya yang kemudian diaplikasikan dalam nilai-nilai keagamaan. Norma agama sebagai perwujudan nilai-nilai budaya masih membelenggu perempuan desa untuk tampil sebagai mitra laki-laki. Antara lain adalah anggapan bahwa melawan terhadap perintah dan keinginan suami sebagai perbuatan dosa. Dari sinilah yang kemudian menjadi alasan dan landasan perempuan untuk tidak mau dan enggan mengurus permasalahan di luar ranah domestik. Satu-satunya cara yang rasional untuk membebaskan mereka dari keestapan itu adalah memberdayakan perempuan-perempuan tadi, tidak saja dari kemiskinan, tetapi juga dari kebodohan, dan keterbelakangan yang merupakan sejumlah

faktor menghambat mereka dalam mengembangkan diri.

Saat ini kemampuan diri seseorang bukan ditentukan pada jenis kelamin namun pada seberapa besar peran yang dilakukan dalam kehidupan. Kualitas individu tersebut lebih ditujukan pada pembagian peran antara laki-laki dengan perempuan. Pandangan masyarakat hendaknya mengalami perubahan khususnya ketika bersentuhan dengan peran seseorang dalam masyarakat. Selama ini masih banyak masyarakat yang memandang sinis terhadap sistem sosial yang kurang menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Seperti yang dijelaskan oleh Murniati Ruslan (dalam Jurnal Musawa, Vol. 2, No.1 Juni 2010) bahwa dalam banyak kasus, perempuan lebih banyak mengalami problematika dalam ruang lingkup yang cukup luas dalam tingkat negara hingga paling sempit yakni keluarga dan dalam berbagai bidang.

Perempuan akhirnya menempati posisi yang rentan dalam bidang domestik dan publik. Golongan ini seringkali mendapatkan kenyataan yang tidak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang merdeka. Jika melongok sekilas pada perkembangan kesadaran akan harkat dan martabat perempuan untuk mendapatkan hak asasinya telah terukir sejak tahun 1970. Pada dasawarsa itu telah muncul kesadaran universal tentang perlunya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi kaum perempuan. Untuk itulah diperlukan pembukaan wawasan

bagi kaum perempuan akan jati dirinya sebagai individu yang sejajar dengan laki-laki. Pembekalan terhadap wawasan tersebut bukan berarti untuk menyaingi atau menjadi kompetitor bagi kaum laki-laki namun memberikan kesadaran akan pentingnya keseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki baik di ranah domestik maupun sosial.

Terbukanya pandangan dari persepsi yang sempit antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan peran yang selama ini masih terkungkung pada perbedaan jenis kelamin atau perbedaan biologis sangat diperlukan untuk perempuan di era global. Globalisasi yang di dalamnya diwarnai dengan nilai-nilai kebebasan dan penghormatan pada HAM menjadikan alasan tersendiri bagi perempuan untuk keluar dari stigma negatif yang selama mengekangnya. Salah satu konotasi negatif yang masih sering dilekatkan oleh masyarakat khususnya pedesaan adalah bahwa perempuan sebagai “konco wingking”. Sosialisasi untuk menggeser mindset perempuan pedesaan dapat menjadi benih bagi upaya melakukan pemberdayaan. Peningkatan kesadaran akan persamaan peran antara laki-laki dan perempuan melalui pemberdayaan bukan semata-mata terbatas pada ruang rumah tangga tapi ditindaklanjuti dengan upaya untuk memperbaiki fungsi dan kemampuannya. Perempuan hendaknya ditempatkan sejajar dan sebagai mitra bagi laki-laki sehingga kedepannya proses pembangunan yang sedang berlangsung dapat

berjalan secara seimbang dengan responsif jender. Pembangunan yang responsif jender bisa terjadi hanya jika di dalamnya terdapat elemen untuk meningkatkan kualitas perempuan yang selama ini masih menjadi pihak lemah (atau terkadang sebagai golongan yang dilemahkan).

Sebagai negara demokratis, sudah menjadi permasalahan yang sangat urgen untuk diselesaikan mengenai penghormatan terhadap HAM kaum perempuan. Masih terdapatnya sedikit banyak pengingkaran terhadap citra kemanusiaan perempuan dalam interelasinya dengan kaum laki-laki masih terlihat dipengaruhi oleh sosio-kultural yang telah diterapkan sejak zaman penjajahan Belanda. Pada waktu itu terlihat bahwa perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan lelaki untuk menempuh pendidikan yang layak. Pendidikan inilah yang dipercaya sebagai obat mujarab untuk memberikan kesempatan bagi perempuan agar dapat mengaktualisasikan jati dirinya, baik di ranah keluarga, masyarakat maupun negara.

Kenyataan yang terkadang sulit dihindari adalah masih kuatnya sistem nilai dalam masyarakat pedesaan yang terkait dengan budaya patriarki. Di dalam sistem ini, terdapat perbedaan dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan terkait distribusi kekuasaan. Hastuti dan Dyah Respati dalam penelitiannya yang berjudul Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Pedesaan, Studi di Lereng Merapi Daerah Istimewa

Yogyakarta (2013) menemukan bahwa masyarakat Jawa khususnya masih kental dengan patriarki terlihat menempatkan dominasi laki-laki yang terlahir lebih kuat untuk mengepalai, mengatur dan mengendalikan rumah tangga serta melindungi perempuan sebagai istri dan anak-anak yang dilahirkannya. Laki-laki juga kental perannya dengan distribusi kekuasaan, akses dan kontrol terhadap sumberdaya dalam keluarga. Tugas perempuan sebagai istri ini didukung oleh nilai yang dikembangkan melalui agama, kepercayaan, dan kebijakan yang menaungi.

Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan partisipasi perempuan dengan memperkuat kemandiriannya perlu mendapat perhatian agar kesejahteraan masyarakat miskin segera dapat diwujudkan. Selain itu melalui penyuluhan perlindungan dan pemberdayaan perempuan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program pengentasan kemiskinan selama ini cenderung kurang memperhatikan peran serta perempuan miskin. Perempuan cenderung ditempatkan sebagai objek bukan sebagai subjek sehingga kurang memberikan hasil signifikan.

Pemberdayaan perempuan merupakan sarana untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan. Pemberdayaan perempuan yang dimaksudkan dalam hal ini biasanya diterjemahkan sebagai upaya memperbaiki fungsi dan kemampuan kaum perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Melalui program pemberdayaan perempuan seperti

ini yang diharapkan bisa mendukung proses pembangunan. Artinya bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya dapat berlangsung secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Proses pembangunan nasional hendaknya di dalamnya tercakup pula elemen pemberdayaan kelompok yang selama ini dinilai paling lemah, yakni perempuan. Dari uraian di atas tampak bahwa cara atau strategi yang paling rasional untuk membebaskan kaum perempuan dari kungkungan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah memberdayakan mereka, baik dari dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Program pemberdayaan kaum perempuan menjadi jalan untuk mengurangi kemiskinan bagi masyarakat pedesaan. Terlebih lagi saat ini laki-laki bukan lagi menjadi satu-satunya pelaku utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kian melonjak harganya. Di sinilah diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini sedikit perlu diberi penjelasan mengenai gender yang seringkali hanya dipahami sebagai jenis kelamin. Pada dasarnya gender bukan sebatas pada perbedaan jenis kelamin antara pria dan perempuan secara biologis. Gender lebih mengacu pada apa yang diharapkan oleh lingkungan budaya dan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan untuk diwujudkan

dalam bentuk perilaku yang pantas. Demikian yang disampaikan oleh Sadli dalam ceramah untuk Forum Peduli Hak Asasi Manusia di Banda Aceh pada bulan Mei 1999. Gender juga sering disebut juga dengan hasil konstruksi sosial yang meliputi sifat, perilaku seseorang sebagai hasil dari asuhan serta sosialisasi nilai. Konstruksi sosial tersebut terwujud melalui sebuah proses belajar sejak masih kanak-kanak hingga dewasa.

Berdasarkan pada pemikiran di atas maka gender dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah, masyarakat dan negara. Gender tersebut pada prinsipnya bersifat universal dengan norma yang hampir dimiliki oleh semua masyarakat. Antara lain adalah bidang yang termasuk dalam ranah laki-laki adalah di luar rumah atau ruang publik sedangkan untuk perempuan adalah seputar rumah atau ranah domestik. Pembagian pekerjaan berdasarkan pada jenis kelamin yang masih kaku tersebut memengaruhi kebiasaan pendidikan dan penilaian mengenai peran gender. Artinya peran pria yang berada pada ranah publik menduduki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan peran domestik yang dijalankan perempuan. Anggapan lain juga pada seputar pendidikan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan agar lebih mudah mendapatkan penghasilan juga masih tersimpan dalam masyarakat.

Di sinilah pentingnya peran serta perguruan tinggi sebagai lembaga formal yang diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Peran lembaga perguruan tinggi melalui kegiatan Pengabdian pada Masyarakat diharapkan dapat menjadi pelaku atau aktor untuk membantu mengentaskan kemiskinan dengan melalui program-program yang memberdayakan masyarakat khususnya perempuan pedesaan. Berdasarkan pada uraian di atas maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan pada bulan Mei 2017 kepada perempuan yang tergabung dalam organisasi PKK Desa Brujul dimaksudkan untuk memberikan wawasan akan pentingnya persamaan peran. Dalam hal ini perempuan hendaknya lebih memahami akan peran serta dan posisinya dalam keluarga sebagai mitra dan pendamping laki-laki atau suami.

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni pertama, untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kelurahan Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Kedua, memotivasi perempuan yang telah berkeluarga dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi PKK agar lebih percaya diri untuk tampil dalam kegiatan publik. Ketiga, mengajak dan mendampingi para perempuan yang tergabung dalam organisasi PKK agar dapat meningkatkan komunikasinya agar dapat

saling menguatkan dan memotivasi satu dengan yang lain.

Luaran yang dapat diberikan melalui pengabdian pada masyarakat ini adalah sebagai berikut pertama, memberikan pemahaman tentang konsep-konsep tentang gender bagi kaum perempuan pedesaan melalui sosialisasi atau penyuluhan. Kedua, memberikan motivasi untuk menggali potensi desa yang bisa dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat desa. Ketiga, meningkatkan kecintaan pada keluarga dan desa dengan meningkatkan jatidiri dan kompetensi perempuan melalui sosialisasi. Keempat, melaksanakan komunikasi dan diskusi untuk menanamkan mindset baru tentang persamaan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan dengan pertama, perbaikan cara pandang dalam masyarakat pedesaan tentang gender melalui sosialisasi. Cara pandang dalam masyarakat pedesaan selama ini masih teguh dengan pandangan bahwa gender cenderung pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan karena jenis kelamin tersebut membawa dampak pada pemisahan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Pentingnya persamaan gender yang diartikan sebagai kemitraan peran antara

laki-laki (suami) dengan perempuan (istri) dalam keluarga. Kemandirian perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar perlu ditingkatkan. Kedua, melalui kegiatan sharing (berbagi pengalaman dan wawasan) dapat memotivasi para perempuan yang tergabung dalam organisasi PKK untuk lebih aktif dalam memainkan perannya sebagai ibu dan istri dalam keluarga yang baik. Indikatornya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan potensinya melalui kegiatan membaca guna menambah wawasan tentang pembinaan rumah tangga yang harmonis, manajemen keluarga dan pemeliharaan kesehatan reproduksi misalnya. Ketiga, mengajak para perempuan yang tergabung dalam PKK untuk lebih aktif berperan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan di ranah publik.

DAFTAR PUSTAKA

Hara, Abubakar Eby, 2007. *Promoting Women Security as Human Security: Indonesian Women Attempt to Find Their Place in the Newly Indonesia Democracy*, draft paper to be presented in International Development Studies Conference on Mainstreaming Human Security: the ASEAN Contribution, Lecturer Faculty of International Studies, University of Utara Malaysia.

Hastuti dan Diah Respati, 2010. *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Pedesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan: Studi di Lereng Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Hasanah, Hasyim, 2013. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, SAWWA, Vol. 9, No. 1.

Munti, Ratna Batara, 2006. *Sejauh Mana Negara Memperhatikan Masalah Perempuan*, Jurnal Perempuan, No. 45.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Majelis Umum PBB, 1993.

Sultana, Abeda, 2011. *Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis* The Arts Faculty Journal, University of Dhaka,.